

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 6 Agustus 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman 16)	Selasa, 6 Agustus 2019	Objek Wisata Padang Kian Tergerus Ombak	Gelombang tinggi yang menghantam pesisir barat Sumatera berpotensi merusak obyek wisata unggulan di Padang.
2	Kompas (Halaman Jendela A)	Selasa, 6 Agustus 2019	Jalan Panjang Bali Baru	Pelan tapi pasti. Itulah gambaran pariwisata Indonesia yang berupaya untuk berkembang. Pariwisata bergerak menjadi salah satu sektor pendorong perekonomian. Kontribusi pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi kian besar dan bersaing dengan sektor lainnya.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 6 Agustus 2019	Tanggul Belum Tentu Jadi Tol	Pembangunan tanggul laut di pesisir Jakarta yang digadang-gadang untuk mengantisipasi penurunan tanah, ternyata masih menunggu pembahasan dan tidak pasti dibangun menjadi jalan tol.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 6 Agustus 2019	Berita Foto	Dampak Tol Desari: Alat berat digunakan pada proyek jalan tol Desari seksi II di Depok, Jawa Barat, Minggu (4/8).
5	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Selasa, 6 Agustus 2019	Berita Foto	Sejumlah penyintas bencana berada di depan hunian sementara yang berkonsep bamboo di Kelurahan Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, pekan lalu.
6	Bisnis Indonesia (Halaman 9)	Selasa, 6 Agustus 2019	Pemprov Kaltim Ajukan Dana Talangan	Pemprov Kalimantan Timur mengajukan permohonan kepada PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda untuk menalangi terlebih dahulu kekurangan pendanaan untuk konstruksi ruas tol seksi I.

Judul	Objek Wisata Padang Kian Tergerus Ombak	Tanggal	Selasa, 6 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Gelombang tinggi yang menghantam pesisir barat Sumatera berpotensi merusak obyek wisata unggulan di Padang.		

Obyek Wisata Padang Kian Tergerus Ombak

Gelombang tinggi yang menghantam pesisir barat Sumatera berpotensi merusak obyek wisata unggulan di Padang.

PADANG, KOMPAS — Dampak abrasi di Pantai Muaro Lasak, salah satu obyek wisata unggulan di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat, semakin meluas. Gelombang laut yang menghantam wilayah pesisir Padang dalam tiga hari terakhir memicu kondisi tersebut.

Berdasarkan pantauan pada Senin (5/8/2019), abrasi merusak berbagai fasilitas di Muaro Lasak. Fondasi belakang dan lantai area Monumen Merpati Perdamaian yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 12 April 2016 tergerus sekitar 2,5 meter. Bangku-bangku taman dari semen terperosok ke laut dan sejumlah pohon nyaris tumbang.

Para pedagang di kawasan itu mengatakan, abrasi mulai terjadi pada Sabtu (3/8) pagi. Saat hendak menyiapkan lapak, pedagang mendapati bibir pantai tergerus ombak. Air laut naik ke daratan hingga 20 meter dibandingkan biasanya.

"Ombak pada Sabtu kemarin paling besar. Dari pagi sampai malam tidak berhenti," ujar Irwan (54), pedagang di Pantai Muaro Lasak. Hingga Senin siang, ombak besar terus menghempas pesisir.

Abrasi juga melanda Muaro

Lasak, pertengahan Juni lalu. Dampak yang ditimbulkan terus meluas. Saat diukur menggunakan aplikasi Google Earth, panjang kawasan pantai yang terkikis menjadi sekitar 480 meter dibandingkan sebelumnya sekitar 300 meter.

Abrasi membuat para pedagang di kawasan pantai semakin terdesak. Irwan terpaksa melanggar garis batas (kuning hitam) yang dipasang satuan polisi pamong praja untuk menggelar kursi dan meja. Penyebabnya, sebagian besar area yang ditempati Irwan terkikis.

Iswarni (36), pedagang lain, mundur sekitar 10 meter dari lokasi biasanya untuk menggelar meja dan kursi. "Biasanya, area belakang ini (dekat ke jalan raya) kosong, tidak pernah kami isi. Sekarang terpaksa dipakai karena pantai di depan sudah habis," kata Iswarni.

Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Padang Sutan Hendra mengatakan, belum ada laporan abrasi di wilayah lain di Kota Padang. Menurut Sutan, abrasi di Pantai Muaro Lasak dipicu fenomena alam gelombang tinggi. Sementara di lokasi hampir tidak ada batu pemecah ombak ataupun tumbuhan ba-

kau untuk melindungi pesisir.

Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur BMKG Syafrizal menyebutkan, beberapa hari terakhir, perairan Padang-Kepulauan Mentawai mengalami gelombang tinggi. Tinggi gelombang tiga meter dan berpotensi memicu abrasi.

"Diperkirakan gelombang tinggi masih akan terjadi dua hingga tiga hari ke depan. Angin dari arah timur-selatan dengan kecepatan 4-20 knot (7,4-37 km per jam) dapat memicu gelombang maksimal 2,5 meter," kata Syafrizal.

Gelombang tinggi dipicu badai tropis Lekima yang berada di Samudra Pasifik di timur Filipina. Badai ini menyebabkan kecepatan angin di selatan ekuator berkisar 4-30 km per jam.

Karung pasir

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang Arfian mengatakan, pemerintah baru bisa mengatasi abrasi, terutama di Monumen Merpati Perdamaian dengan karung berisi pasir. Karung bantuan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V itu dipasang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pencanaan Ruang (PUPR) Padang,

Senin sore.

Menurut Arfian, Pemkot Padang belum bisa memperbaiki kerusakan pada Monumen Merpati Perdamaian. Dinas PUPR Padang sebenarnya sudah pernah membenahi kerusakan fondasi monumen, tetapi rusak lagi. Dinas tidak bisa menganggarkan perbaikan di lokasi sama dalam waktu berdekatan.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan BWSS V. Namun, karena mendadak, balai tidak bisa menganggarkan dan hanya bisa membantu karung pasir penahan ombak," katanya.

Selain Pantai Muaro Lasak, pertengahan Juli 2019, abrasi juga terjadi di Pantai Muaro Padang, sekitar tiga kilometer dari Pantai Muaro Lasak. Abrasi merusak pagar pelindung masjid yang sedang dibangun Pemkot di tepi Pantai Muaro Padang. BWSS V sedang membangun batu pemecah ombak untuk melindungi masjid yang diproyeksikan sebagai ikon wisata halal itu.

Beberapa tahun belakangan, Kota Padang serius membenahi sektor pariwisata, terutama wisata pantai. Abrasi mengancam investasi yang digelontorkan pemerintah. (JOL)

Judul	Jalan Panjang Bali Baru	Tanggal	Selasa, 6 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman Jendela A)		
Resume	Pelan tapi pasti. Itulah gambaran pariwisata Indonesia yang berupaya untuk berkembang. Pariwisata bergerak menjadi salah satu sektor pendorong perekonomian. Kontribusi pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi kian besar dan bersaing dengan sektor lainnya.		

JALAN PANJANG BALI BARU

Pelan tapi pasti. Itulah gambaran pariwisata Indonesia yang berupaya untuk berkembang. Pariwisata bergerak menjadi salah satu sektor pendorong perekonomian. Kontribusi pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi kian besar dan bersaing dengan sektor lainnya.

BUDI AWAN SIDIKA

Pada 2014-2018, sumbu-an sektor wisata bagi produk domestik bruto (PDB) rata-rata meningkat sekitar 7 persen per tahun. Lagi ini merupakan salah satu yang terbesar di antara 21 sektor lapangan usaha di Indonesia. Besarannya kian tak terputus jauh dengan pertumbuhan sektor informasi dan telekomunikasi serta sektor transportasi dan perdagangan yang tumbuh di atas 7 persen. Kenaikan pertumbuhan nilai tambah produksi dan jasa wisata mengabdikan pertumbuhan sektor industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian yang selamanya ini menjadi andalan perekonomian nasional.

Dengan kekayaan alam dan budaya yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia sangat kaya akan berbagai budaya dan potensi wisata. Sayangnya, belum semuanya tergarap optimal.

Merujuk data sektor akomodasi, makanan-minuman pada produk domestik regional bruto (PDRB), yang merupakan representasi sektor wisata, terlihat hanya sejumlah provinsi yang perawatannya masih terjaga. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 4 provinsi dengan sumbu-an pariwisata terhadap perekonomian daerah relatif besar.

Daerah itu adalah DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kontribusi pertumbuhan per tahun di DKI Jakarta dan Jawa Timur masing-masing berkisar 5 persen, sedangkan Yogyakarta sekitar 9 persen, dan terbesar ialah Bali, hampir 20 persen setahun.

Selain keempat provinsi, kontribusi pariwisata di wilayah lainnya rata-rata kurang dari 3 persen. Bahkan, ada sembilan provinsi yang memiliki kontribusi pariwisata sangat kecil, yakni kurang dari 1 persen. Daerah itu adalah Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Ironi wisata
Kondisi itu sangat ironis karena keseluruhan provinsi itu terbelah memiliki luas wisata dengan daya tarik luar biasa. Lokasi itu antara lain Labuan Bajo di NTT, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Suku Turaja di Sulawesi Barat, Pulau Morotai dan Ternate di Maluku Utara, serta Raja Ampat di Papua Barat.

Rendahnya kontribusi wisata bagi provinsi menunjukkan pariwisata di daerah tersebut belum mampu menggerakkan ekonomi yang lebih luas. Wisata belum menjadi perhatian masyarakat secara umum sehingga daya tarik tempat wisata tersebut rendah. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan Bali yang selalu ramai

Capaian Sektor Pariwisata



Nilai dan Kontribusi Sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman terhadap PDRB Setiap Provinsi Tahun 2018



Sumber: BPS dan BPS, Divisi Statistik Wilayah dan Statistik

Hingga kini, hanya lima provinsi yang mengalami kenaikan pertambahan nilai barang dan jasa wisata lebih dari Rp 1 triliun per tahun.

dengan kunjungan wisatawan. Dari seluruh objek wisata di Indonesia, mayoritas (98 persen) merupakan turis lokal. Kontribusi turis mancanegara relatif sangat minim. Namun, di Bali jumlah kunjungan wisatawan asing lebih banyak daripada turis domestik. Pada 2017, jumlah kunjungan turis luar negeri di Bali mencapai 56 persen, sedangkan wisatawan dalam negeri 44 persen.

Dari sekitar 20 pintu kedatangan internasional di Indonesia, sekitar 40 persen terkumpul melalui Bandara Ngurah Rai, Bali. Kelayakan turis asing mencapai lebih dari 5 juta orang per tahun yang tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Bali Baru
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menetapkan lima fokus program pembangunan nasional, yakni di bidang infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Kefinannya diharapkan mampu memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada 2018, target kontribusi wisata pada PDRB nasional yang mempunyai 805 juta perjalanan, melebihi target 270 juta perjalanan. Meski demikian, target untuk wisatawan mancanegara belum tercapai. Pada 2018, di-tangkap jumlah wisatawan asing 17 juta orang tetapi realisasinya 15,81 juta orang.

Target kunjungan turis asing pada 2018 yang tak tercapai menunjukkan belum semant program pariwisata berjalan sesuai rencana. Salah satunya program pengembangan 10 destinasi pariwisata "Bali Baru"

yang dicanangkan pada 2016. Adapun ke-10 tempat itu adalah Danau Toha, Sumatera Utara; Tanjung Kelagang, Belitung; Kepulauan Seribu, Jakarta; Tanjung Lestari, Banten; Borobudur, Jawa Tengah; Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur; Pulau Komodo, NTT; Mandalika, NTB; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; dan Morotai, Maluku Utara.

Amerindi wisata Bali Baru diharapkan mampu membuat Indonesia tak selalu bergantung pada pariwisata wisata di Bali. Dengan cara ini, jumlah wisatawan asing di Indonesia pun diharapkan meningkat.

Untuk mewujudkan Bali Baru tidak mudah. Sejumlah hambatan dan kendala pasti akan ditemui mengingat posisi tempat wisata yang dicanangkan berada di bawah naungan sejumlah pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga adat, swasta, ataupun kementerian tertentu.

Oleh karena itu, dibentuklah sejumlah lembaga pengelola manajemen wisata, misalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, KEK Tanjung Kelagang, KEK Tanjung Lestari, dan KEK Morotai. Daerah lain yang belum mempunyai KEK dikelola oleh Badan Otorita Pariwisata (BOP), seperti Danau Toha dan Borobudur. Empat daerah lain, seperti Kepulauan Seribu, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru, masih bergantung destinasi wisata prioritas biasa. Destinasi wisata ini diharapkan dapat dikelola BOP ataupun KEK agar perkembangan cepat.

Untuk destinasi Bali Baru yang berada di provinsi yang memiliki kontribusi wisata tinggi upaya mendorong kunjungan turis mancanegara tidak terlalu berat, berbeda dengan daerah-daerah yang nilai sumbu-an wisatanya kecil. Provinsi NTT, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara yang kontribusi sektor wisata bagi PDRB-nya rata-rata kurang dari Rp 300 miliar per tahun termasuk daerah dengan nilai sumbu-an wisata kecil. Jasa akomodasi dan pelayan-

an terkait wisata belum menjadi prioritas ekonomi setempat. Dengan kata lain, pariwisata belum menjadi fokus perhatian masyarakat masyarakat.

Di ke-10 tempat wisata itu, jumlah kunjungan wisatawan asing tahun 2018 masih kurang dari 500.000 orang dengan devisa sekitar 220 juta dolar AS. Pada tahun 2019-2020, diproyeksikan 10 Bali Baru dapat menarik minat turis asing hingga 10 juta orang serta menarik devisa asing hingga 10 miliar dolar AS (Rp 142,5 triliun).

Target wisata itu tentu saja sangat fantastis mengingat PDRB sektor pariwisata di seluruh Indonesia pada tahun 2018 masih di kisaran Rp 300 triliun. Dengan target devisa Bali Baru mencapai Rp 142,5 triliun per tahun, angka itu sangat besar.

Hingga kini, hanya lima provinsi yang mengalami kenaikan pertambahan nilai barang dan jasa wisata lebih dari Rp 1 triliun per tahun. Daerah tersebut adalah Provinsi Bali dan Jawa Tengah dengan pertambahan nilai wisata berkisar Rp 1,7 triliun.

Jawa Barat rata-rata naik sekitar Rp 2,6 triliun, DKI Jakarta tumbuh sekitar Rp 4,2 triliun, dan terbesar Jawa Timur hingga sekitar Rp 5,6 triliun per tahun. Kenaikan tersebut mendorong nilai PDRB sektor akomodasi dan penyediaan makan-minuman di sektor provinsi rata-rata di atas Rp 26 triliun per tahun. Bahkan, untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur, nilai sektor akomodasi dan penyediaan makan-minuman masing-masing sekitar Rp 77 triliun per tahun.

Lima daerah itu secara umum sangat berpotensi mendorong sektor pariwisata lebih tinggi. Akses dan pelayanan pariwisata di wilayah tersebut relatif memadai untuk mendukung pariwisata. Jadi, hal yang terpenting adalah menambah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, langkah yang bisa ditempuh ialah mengoptimalkan obyek-obyek wisata andalan di lima provinsi itu. Niscaya, jumlah kunjungan akan naik.

Judul	Tanggul Belum Tentu Jadi Tol	Tanggal	Selasa, 6 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Pembangunan tanggul laut di pesisir Jakarta yang digadang-gadang untuk mengantisipasi penurunan tanah, ternyata masih menunggu pembahasan dan tidak pasti dibangun menjadi jalan tol.		

► PESISIR JAKARTA

Tanggul Belum Tentu Jadi Tol

Bisnis, JAKARTA — Pembangunan tanggul laut di pesisir Jakarta yang digadang-gadang untuk mengantisipasi penurunan tanah, ternyata masih menunggu pembahasan dan tidak pasti dibangun menjadi jalan tol.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan bahwa untuk pembangunan tanggul laut masih dilakukan kajian-kajian yang bisa saja berubah tidak menjadi jalan tol.

"*Review masterplan* ini boleh saja arah kajiannya kemana, tergantung pembahasan. Ini kan kajian sekarang jalan dan jembatan, bisa juga tol, tetapi kalau memang diperlukan, jalan bisa ditutup jadi *tunnel* atasnya," katanya saat dihubungi *Bisnis*, pekan lalu.

Kajian ini membutuhkan tujuh fase yang saat ini baru sampai empat fase dan masih akan berubah tergantung dari hasil pembahasan yang dipilih. "Ini baru fase 4. Masih berubah-ubah, tetapi saat ini pemikirannya seperti itu [jalan], target fase 7 mungkin 2020 saya kira nanti pasti sudah tahu akan jadi apa," ujarnya.

Adapun, model pembiayaannya juga akan diputuskan dalam pembahasan fase 6. Pria yang akrab disapa Yogi ini mengatakan, bisa

saja menggunakan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau menggandeng investor.

Secara umum, tanggul laut lepas pantai akan dibangun di Teluk Jakarta sepanjang 35 kilometer, membentang dari ujung Barat hingga ujung Timur.

Waktu pembangunan tanggul akan bergantung pada ketersediaan dana, kondisi di lapangan, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga investor.

Staf Ahli Menteri PUPR Firdaus Ali mengatakan, pembangunan tanggul laut lepas pantai atau dikenal dengan sebutan *giant sea wall* merupakan upaya jangka panjang dalam mengatasi penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan kenaikan muka air laut di pesisir Jakarta. Sementara itu, upaya jangka pendek telah dilakukan dengan membangun tanggul di bibir pantai sepanjang 20,1 kilometer.

Firdaus menjelaskan, pembangunan tanggul laut lepas pantai kan menjadi tahap kedua dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN). Saat ini, Indonesia, Korsel, dan Belanda masih menyusun draf konsep yang akan menjadi *masterplan* pembangunan tanggul. *(Krisia Putri K.)*

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 6 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Dampak Tol Desari: Alat berat digunakan pada proyek jalan tol Desari seksi II di Depok, Jawa Barat, Minggu (4/8).		

► **DAMPAK TOL DESARI**



Bisnis/Arief Hermawan P

Alat berat digunakan pada proyek jalan tol Desari seksi II di Depok, Jawa Barat, Minggu (4/8). Ruas tol yang ditargetkan rampung pada akhir 2019 tersebut akan membuka akses transportasi penghubung Jakarta, Bogor, Bekasi hingga Tangerang, sehingga

diprediksi berdampak positif pada pertumbuhan perumahan dan apartemen yang selaras dengan meningkatnya nilai investasi sektor properti di kawasan tersebut.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 6 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Sejumlah penyintas bencana berada di depan hunian sementara yang berkonsep bamboo di Kelurahan Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, pekan lalu.		

► **HUNIAN SEMENTARA**



Antara/Basri Marzuki

Sejumlah penyintas bencana berada di depan hunian sementara yang berkonsep bambu di Kelurahan Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, pekan lalu. KUN Humanity System+ membangun sedikitnya 64 unit hunian sementara berbahan bambu di Palu dan Sigi untuk membantu para penyintas bencana yang lebih dari 10 bulan pascabencana belum mendapatkan tempat bernaung. Penggunaan bambu itu sekaligus memanfaatkan sumber daya lokal yang banyak tersedia di wilayah itu.

Judul	Pemprov Kaltim Ajukan Dana Talangan	Tanggal	Selasa, 6 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Pemprov Kalimantan Timur mengajukan permohonan kepada PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda untuk menalangi terlebih dahulu kekurangan pendanaan untuk konstruksi ruas tol seksi I.		

► JALAN TOL BALSAM

Pemprov Kaltim Ajukan Dana Talangan

Bisnis, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan permohonan kepada PT Jasa Marga Balikpapan—Samarinda untuk menalangi terlebih dahulu kekurangan pendanaan untuk konstruksi ruas tol seksi I.

Anitana W. Puspa
anitana.puspa@bisnis.com

Ruas Tol Seksi I Balikpapan—Semboja itu menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga bisa mengejar target operasional pada akhir tahun ini.

Adapun, ruas tol yang dikenal dengan tol Balsam ini membentang sepanjang 99 km terdiri atas lima seksi. Perinciannya, ruas seksi I dan seksi V total sepanjang 33,11 menjadi porsi yang dibangun oleh pemerintah atas skema *viability gap fund* (VGF) supaya nilai investasinya lebih layak bagi badan usaha jalan tol (BUJT). Sisanya ruas seksi II, III, dan IV merupakan investasi yang digarap oleh BUJT.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kaltim Kaltara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Ruddy Tangkere mengatakan, konstruksi fisik ruas seksi satu sepanjang 2,1 km masih terkendala karena belum dianggarkannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat molornya penyelesaian dari tenggat waktu yang telah ditetapkan. Refly memperkirakan kebutuhan pendanaan itu senilai Rp200 miliar.

"Di situ kendala proses serah terima dari provinsi. Pak gubernur

sudah meminta untuk menangani dari sumber dana BUJT. Sudah meminta tetapi mereka [BUJT] belum memberikan kepastian. Karena itu sebetulnya bagian VGF. BUJT diminta ditangani dulu karena pemerintah kekurangan dana. Pemerintah harus bersikap karena harus selesai Desember," jelasnya, Senin (5/8).

Selain itu, lanjut dia, pengerjaan oleh PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda dinilai bisa lebih cepat dibandingkan pemerintah yang terbentur oleh birokrasi.

"Kami tidak bisa di proses birokrasi dan kontrak selesai kalau ada tambahan di atas 10% lebih dari itu harus lelang. Nah, Kami minta daripada lelang lembali dia [BUJT] saja yang mengerjakan," tegasnya.

Secara umum, saat ini progress pembangunan fisik jalan tol telah mencapai 92% dengan kemajuan pembebasan lahan sebesar 98%. Selain keterbatasan dana porsi pemerintah, pembebasan lahan juga menjadi faktor penting yang bisa menjadi penyebab molornya target serah terima pada akhir tahun ini.

Dia menyebutkan bahwa pembebasan lahan memang mundur dari jadwal semula yang semestinya tuntas pada April tahun ini.

"Diperkirakan dulu, kami selesai

pembebasan tanah April tapi kembali bergeser ada beberapa di seksi lima itu selesainya September kalau tidak ada hambatan di konsinyasi. Itu sulit diprediksi. Kami masih mengupayakan akhir tahun ini bisa selesai," ungkapnya.

Kepastian PT Jasa Marga Tbk. untuk menalangi kembali konstruksi memang harus dipertimbangkan. Pasalnya saat ini secara arus kas, BUJT telah dibebani memberikan dana talangan bagi pembebasan lahan tol. Penggantian bagi lahan tol akan dilakukan pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

PERLU PERCEPATAN

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, pada prinsipnya tanah merupakan kewajiban negara tetapi karena harus memenuhi serangkaian tata kelola sehingga untuk poyek strategis nasional yang memerlukan percepatan dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh BUJT yang akan diganti oleh LMAN sesuai dengan ketentuan.

Rahayu menyebutkan, LMAN telah melakukan pembayaran dana talangan ruas tol Balikpapan—Samarinda untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun senilai total Rp284,32 miliar.

Menurutnya, masih terdapat nilai yang menunggu kelengkapan dokumen dari PPK kepada LMAN dan masih ada sejumlah tagihan yang dalam proses penelitian administrasi di LMAN dan segera dibayarkan.

"Mengingat permohonan tersebut baru disampaikan kepada LMAN di minggu terakhir Juli 2019. Totalnya sekitar Rp162,28 miliar," jelasnya.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, pembangunan jalan tol Balikpapan—Samarinda menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi Rp 9,9 triliun.

"Ditargetkan dapat rampung pada akhir 2019. Adanya tol dapat memangkas biaya logistik barang dan jasa dan waktu tempuh dua kota tersebut dari semula sekitar 3 jam, menjadi hanya 1 jam," katanya.



Sumber: Pemprov Kaltim

Bisnis/Erangga Adiputra/Radhyo Eko